MEMBANGUN KESADARAN DEMOKRASI MENJELANG PILGUB DKI JAKARTA BAGI GENERASI MUDA

Syahrial Syarbaini

Pelaksana Akademik Mata kuliah Umum (PAMU), Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No 9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
syahrialsyarbaini@gmail.com

Abstract

Democracy as a modern system of government. In the implementation of democracy often leads to lack of achievement of objectives, namely the State's prosperity and the nation's intelligence, political system of Pancasila democracy is a political system that is constitutional. The political system of Pancasila democracy should not only be reflected in the various activities of government and state, but must also be reflected in the social life of Indonesian citizens everyday, the process of democratization in Indonesia at the local level are marked with the recruitment process of regional heads submitted directly to the people with the hope of being able provide material corrections to the abuses of democratic practice in the past, the embodiment of the elections directly, local governance and political institutions of local (DPRD) can cooperate in accordance with the expectations of the people, an area will get a head area of a reliable, competent and have high integrity building area, local elections Concurrent has benefits, including budget efficiency and effectiveness of electoral institutions.

Keywords: awareness, democracy, youths

Abstrak

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan negara modern. Dalam implementasinya demokrasi sering kurang mengarah tercapainya tujuan Negara yaitu kemakmuran dan kecerdasan bangsa, Sistem politik demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang konstitusional. Sistem politik demokrasi Pancasila tidak hanya harus tercermin dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan kenegaraan, tetapi harus juga tercermin dalam kehidupan bermasyarakat warga Negara Indonesia sehari-hari, proses demokratisasi di Indonesia di tingkat lokal ditandai dengan proses rekrutmen kepala daerah diserahkan secara langsung kepada rakyat dengan harapan mampu memberikan bahan koreksi terhadap penyelewengan praktik demokrasi dimasa lalu, perwujudan Pilkada langsung, tata pemerintahan daerah dan institusi politik lokal (DPRD) dapat bekerja sama sesuai dengan harapan rakyat, suatu daerah akan mendapatkan kepala daerah yang handal, kompeten dan mempunyai integritas tinggi membangun daerah, pilkada serentak memiliki manfaat, diantaranya efisiensi anggaran dan efektivitas lembaga pemilihan umum.

Kata kunci: kesadaran, demokrasi, generasi muda

Pendahuluan

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan dalam masyarakat dan negara modern yang hampir semua negara di dunia menggunakan sistem pemerintahan ini, bahkan sebagai alat dalam melancarkan hubungan internasional. Indonesia sebagai negara berkembang juga mengikuti sistem pemerintahan ini sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi "... berkedaulatan rakyat berdasarkan ...", serta dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: Kedaulatan berada ditangan rakyat dilakukan menurut undang-undang dasar. Demokrasi di Negara Indonesia memiliki landasan secara idiil dan konstitusional yang tidak dapat diubah termasuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sekalipun.

Dalam implementasinya demokrasi sering kurang mengarah tercapainya tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu terciptanya perlindungan terhadap bangsa dan tanah air, terciptanya kecerdasan dan kemakmuran bangsa. Khususnya masih kita rasakan masih kurangnya kualitas sumber daya manusia dan masih banyaknya tingkat kemiskinan.

Semenjak reformasi dilakukan upaya memperkuat demokrasi pada tingkat lokal/daerah. Negara telah menetapkan otonomi daerah yang lebih kuat yang disertai dengan pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga daerah-daerah telah diberi tanggung jawab secara bersama-sama untuk mewujudkan kecerdasan dan kemakmuran

bersama. Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah perlu peningkatan partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara sehingga pimpinan daerah-daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut, yang dikenal dengan istilah pilkada (Pemilihan Umum Kepada Daerah). Pada tahun 2017 DKI Jakarta mendapat kesempatan melaksanakan pilkada secara serentak dengan beberapa pilkada di daerah-daerah lain seluruh Indonesia.

Persoalan yang kita hadapi dalam Pilkada tersebut adalah bagaimana kita dapat melahirkan kepemimpinan yang lebih dicintai rakyatnya karena kemampuan, tanggung jawab, kecerdasan dalam membawa Jakarta menjadi ibu kota yang stabilitas yang tinggi, kecerdasan dan kemakmuran warganya meningkat.

Dalam tulisan yang pendek ini kita perlu memahami prinsip utama yaitu menciptakan kesadaran berdemokrasi sebagai suatu keberhasilan menciptakan pemerintahan daerah yang lebih baik.

Arti dan Makna Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, *demokrasi* artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dalam arti luas, selain mencakup pengertian demokrasi pemerintahan, juga meliputi demokrasi ekonomi dan sosial. Namun pengertian demokrasi yang paling banyak dibahas dari dahulu sampai sekarang ialah demokrasi pemerintahan.

Gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi ialah pengakuan hakikat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara yang satu dan yang lain. Berdasarkan gagasan dasar itu, dapat ditarik dua buah asas pokok sebagai berikut.

- a. Pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan. misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia.
- b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS mengintisarkan demokrasi sebagai sistem yang memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni:

Kedaulatan rakyat; Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; Kekuasaan mayoritas; Hak-hak minoritas; Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM); Pemilihan yang bebas dan jujur; Persamaan di depan hukum; Proses hukum yang wajar; Pembatasan pemerintahan secara konstitusional; Pluralisme Sosial; Ekonomi dan politik; dan Nilai-nilai toleransi; Pragmatisme; Kerjasama dan mufakat.

Demokrasi negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi negara yang lain dan bentuk demokrasi itu pada suatu masa akan berbeda dari bentuk demokrasi pada satu masa yang lain. Misalnya, bentuk demokrasi pada masa sekarang berbeda dari bentuk demokrasi pada masa UUD RIS tahun 1949, masa UUD Sementara tahun 1950, Orde lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.

Di dunia barat, demokrasi berkembang di dalam suatu sistem masyarakat yang liberal (bebas dan merdeka). Oleh karena itu, lahirlah suatu bentuk demokrasi yang dinamakan demokrasi liberal, yang menjunjung hak-hak asasi manusia setinggi-tingginya, bahkan kadang-kadang di atas kepentingan umum. Sebagai akibat demokrasi liberal ini, lahirlah sistem-sistem pemerintahan yang liberal. Di dalam sistem pemerintahan ini, peranan dan campur tangan pemerintah tidak terlalu banyak di dalam kehidupan masyarakat. Karena sistem ini sesuai dengan aspirasi rakyat di dunia barat, sistem pemerintahan yang liberal ini mendapat dukungan penuh dari rakyat.

Atas dasar itu, demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*value*). Henry B. Mayo telah mencoba untuk merinci nilai-nilai ini dengan catatan bahwa tentu saja tidak berarti setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai-nilai ini, melainkan tergantung kepada perkembangan sejarah, aspirasi dan budaya politik masing-masing. Berikut adalah nilai-nilai yang diutarakan Henry B Mayo:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Dengan demikian, bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan yang bertanggung jawab.
- 2) Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas dan rahasia. Dewan ini harus mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah tentu saja pengawasan yang konstruktif (kritik membangun) dan sesuai normatif (aturan yang berlaku)
- 3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (parpol). Parpol ini menjalin hubungan yang rutin dan berkesinambungan antara rakyat dengan pemerintah.
- 4) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- 5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Sistem Politik Demokrasi Pancasila di Indonesia

Sistem politik demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang konstitusional, karena segala kegiatan politik baik komponen suprastruktur politik maupun infrastruktur politik yang ada semuanya berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawahnya.

Mekanisme demokrasi Pancasila berkaitan dengan lembaga-lembaga konstitusional yang ada di Indonesia, baik itu yang berada di tingkat pusat maupun di daerah. Konstitusional bermakna pelaksanaan demokrasi Pancasila tersebut sesuai dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan dengan bersandar kepada prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila.

Beberapa prinsip pelaksanaan mekanisme demokrasi Pancasila dalam kegiatan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Kekeluargaan sebagai cita-cita kenegaraan. Artinya cita-cita dalam kehidupan kenegaraan bukan hanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga anggota masyarakat yang lainnya, karena

mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

2. Paham kesatuan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan berdasarkan sistem politik demokrasi Pancasila menekankan pada upaya untuk selalu mengutamakan semangat sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia.
3. Negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi Pancasila, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah selalu dilandasi pada ketentuan-ketentuan hukum formal.
4. Sistem konstitusional, penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi Pancasila didasarkan pada konstitusi negara.
5. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi Pancasila didasarkan pada aspirasi rakyat.
6. Pemerintahan yang bertanggung jawab, ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan demokrasi Pancasila, baik secara administratif maupun organisatoris.
7. Pemerintahan berdasarkan perwakilan, pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam pemerintahan tidak bisa dilaksanakan secara langsung, tetapi melalui perwakilan dalam DPR dan DPD.
8. Pemerintahan presidensial, mekanisme sistem pemerintahan dalam demokrasi Pancasila menggunakan sistem presidensial. Artinya, presiden merupakan kepala pemerintahan (eksekutif) yang akan memimpin kabinet.
9. Pengawasan, implementasi mekanisme sistem politik demokrasi Pancasila menuntut adanya pengawasan dari banyak pihak, bukan hanya dari pejabat yang lebih tinggi dari penyelenggara pemerintahan tersebut, tetapi yang diutamakan adalah pengawasan dari rakyat.

Implementasi prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya sudah diatur dalam aturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945 dan aturan lain yang berada di bawahnya. Ketentuan-ketentuan hukum inilah yang menjadi acuan gerak pelaksanaan sistem politik demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di lembaga-lembaga kenegaraan tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Sistem politik demokrasi Pancasila tidak hanya harus tercermin dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan kenegaraan, tetapi harus juga tercermin dalam kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesia sehari-hari.

Otonomi Daerah

Di dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan wilayah dan daerah-daerah (provinsi, kabupaten, dan seterusnya). Pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilakukan dengan sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi.

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah dibawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, contoh model pemerintahan Soeharto (Orde Baru) di Indonesia.

Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang melimpahkan sebagian kewenangan pusat ke daerah, dan kepala daerah melaksanakan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di daerahnya sendiri, contoh pemerintahan pasca orde baru di Indonesia dan pemerintahan di Malaysia

Landasan konstitusional pemerintah adalah UUD 1945 pasal 18 (2): Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 (5): Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Otonomi adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan sendiri berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku (UU No. 32 tahun 2004).

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (UU No. 32 tahun 2004).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan kepada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi luas adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan pada bidang-bidang tertentu yang masih ditangani oleh pemerintah pusat. Kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat meliputi beberapa bidang antara lain seperti: Politik/Hubungan luar negeri; Pengadilan/yustisi; Moneter dan keuangan; Pertahanan; Keamanan; dan agama.

Dalam perkembangan selanjutnya nampaknya desentralisasi merupakan pilihan yang dianggap terbaik untuk menyelenggarakan pemerintahan, meskipun implementasinya di beberapa negara, terutama di negara ketiga masih banyak mendapat ganjalan struktural, sehingga penyelenggaraan desentralisasi politik masih setengah hati (Abdul Wahab, 1994).

Sistem desentralisasi adalah sistem di mana sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Dengan demikian daerah bertanggung jawab sepenuhnya pengelolaan baik dari aspek perencanaan, peralatan dan pembiayaan maupun personil dan lain-lainnya.

PBB pada tahun 1962 memberikan pengertian desentralisasi sebagai berikut: Pertama, dekonsentrasi yang juga disebut dekonsentrasi birokrasi dan administrasi; Kedua, devolusi yang sering disebut desentralisasi demokrasi dan politik (Zauhar).

Otonomi Daerah dan Implementasinya

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004, pemerintah daerah dalam era otonomi diberi kesempatan untuk membuat dan mengembangkan kebijakannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya masing-masing. Pada prinsipnya otonomi daerah merupakan sarana untuk menjawab tiga persoalan mendasar dalam tatanan pemerintahan dan pelayanan terhadap publik (Widodo, Lestari, 2008: 71-72), yaitu:

1. Otonomi daerah merupakan upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat.

2. Melalui otonomi daerah dapat tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik.
3. Kesempakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan ikut serta bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

Dalam aspek ekonomi, implementasi otonomi daerah bertujuan untuk memberdayakan kapasitas daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Otonomi daerah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah lokal untuk membuat kebijakan ekonomi sesuai dengan kepentingan daerahnya, misalnya dengan membuat regulasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit terkait dengan kepentingan masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di daerah sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Peningkatan investasi akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik yang pada gilirannya berdampak luas kepada penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal. Dengan demikian, peningkatan perekonomian daerah berdampak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, juga diharapkan memberi pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, nasional, regional maupun global.

Dalam aspek sosial budaya, implementasi otonomi daerah merupakan apresiasi terhadap keanekaragaman daerah, baik suku bangsa, agama, nilai-nilai sosial dan budaya serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Namun, masalah pengelolaan lingkungan hidup harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemanfaatan sumber daya alam seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya eksploitasi bahan tambang, pemanfaatan sumber daya hutan (*logging*) telah berdampak kepada ancaman kelestarian lingkungan, dalam hal ini perlu kewenangan pemerintah pusat terlibat baik dalam bentuk regulasi dan permodalan dengan transfer APBN ke daerah daerah dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan bagi hasil.

Demokrasi Lokal (Pemilihan Kepala Daerah/ Pilkada)

Proses demokratisasi di Indonesia terutama ditingkat lokal ditandai dengan diperkenalkannya desain kelembagaan yang baru, yakni proses rekrutmen kepala daerah diserahkan

secara langsung kepada rakyat. Perubahan pemilihan kepala daerah dari tidak langsung (dipilih oleh DPRD) menjadi pemilihan langsung (dipilih oleh rakyat) merupakan lanskap baru dalam konstelasi politik dan praktik demokrasi di Indonesia. Implementasi pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai pada tahun 2005.

Pilihan desain kelembagaan baru tersebut diperkenalkan dengan harapan mampu memberikan bahan koreksi terhadap penyelewengan praktik demokrasi dimasa lalu. Sebagaimana disampaikan oleh Kacung Marijan (2007) bahwa desain kelembagaan baru (*new institutionalism*) yang dianut oleh suatu negara memiliki pengaruh terhadap wajah demokrasi yang dimiliki.

Penting dicatat di sini bahwa periode Orde Baru adalah sejarah suram desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun. Pengangkatan kepala daerah tidak terikat dengan hasil pemilihan dari DPRD, karena sistem pemerintahan lebih cenderung kepada pelaksanaan sentralisasi sekaligus secara formal ada asas dekonsentrasi.

Landasan konstitusional pelaksanaan demokrasi lokal atau pemilihan kepala daerah, adalah UUD 1945 pasal 18 (4): Gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis sebagai landasan pilkada langsung atau tidak langsung, tergantung kesepakatan dalam undang-undang.

Berdasarkan sistem pemerintahan desentralisasi, maka ada keterkaitan otonomi daerah dengan pilkada langsung, yang mana menurut Smith (Romli, 2005: 286) adalah: Pendidikan politik; Latihan kepemimpinan politik; Memelihara stabilitas; Mencegah konsentrisasi kekuasaan dari pusat; Memperkuat akuntabilitas publik dan; Meningkatkan kepekaan elite terhadap kebutuhan masyarakat.

Prinsip dan cita-cita diselenggarakannya sistem demokrasi pada tingkat otonomi daerah dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki tiga kepentingan pokok, yaitu:

1. Pilkada bertujuan untuk menghidupkan demokrasi lokal (*making local democracy work*). Demokrasi representatif yang dipraktikkan sebelumnya terutama pada masa Orde Baru memiliki banyak kelemahan. Kepala daerah hasil pilihan Dewan Perwakilan Daerah

(DPRD) sering berbenturan dengan aspirasi rakyat. Hal ini sangat beralasan mengingat kepala daerah terpilih belum tentu merupakan pilihan rakyat melainkan pilihan para wakil rakyat yang notabene tidak jarang melakukan kolusi atau kongkalikong dalam proses pemilihan. Karena model pemilihan yang rentan kolusi, korupsi, dan nepotisme inilah pada akhirnya melahirkan model kepemimpinan yang tidak mewakili kepentingan rakyat. Alhasil, kepentingan rakyat kadang tidak terakomodasi dalam kebijakan pemerintah.

2. Pilkada langsung bertujuan untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah (*local democracy governance*). Sebagaimana diuraikan di atas bahwa praktik penyelenggaraan pemerintah daerah di bawah kepala daerah pilihan DPRD mendistorsi keinginan rakyat untuk menciptakan tatanan pemerintahan daerah yang baik dan berkeadilan. Rakyat bahkan tidak pernah diperhitungkan sebagai elemen penting dalam mengelola pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung yang dalam pelaksanaannya melibatkan rakyat melalui pilkada diharapkan bisa menjadi jawaban atas praktik ketidakadilan pemilihan tidak langsung yang selama bertahun-tahun terjadi di Indonesia.
3. Pilkada langsung mendorong bekerjanya institusi-institusi politik lokal. Pengalaman ini menunjukkan bahwa perfoma institusi politik lokal sangat jelek bahkan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. DPRD terkenal sebagai lembaga tukang stempel dan berfungsi sebagai lembaga yang melestarikan budaya datang, duduk, dengar, diam plus duit (5D). Tidak cukup sampai di situ, DPRD juga mendapatkan *image* cukup jelek karena sebagai ladang untuk praktik jual beli suara ketika pemilihan kepala daerah tidak langsung diberlakukan.

Demokrasi lokal sebagai perwujudan Pilkada langsung, tata pemerintahan daerah dan institusi politik lokal (DPRD) dapat bekerja sama sesuai dengan harapan rakyat, tetapi dalam pengalaman ditemukan (Muchtar, 2007: 63-64), ada sejumlah distorsi dan paradoks yang menyertai pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah, seperti munculnya berbagai macam konflik, politik uang, *black campaign*, kultur

demokrasi yang lemah dan adanya kandidat miskin visi, misi dan program.

Kekuatan yang bermain dalam pilkada (pemilihan gubernur, walikota dan bupati) ditandai dengan pertarungan yang melibatkan komponen kekuatan politik yang terdiri dari:

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah (birokrasi)
3. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
4. Partai politik
5. Kapitalis lokal, dan
6. Preman-preman lokal (*local hoodlums*).
7. Organisasi massa (ormas)

Berbagai konflik yang muncul dari penyelenggaraan pilkada dapat dilihat dari berbagai bentuk yang terjadi sampai tahun 2005 (Muchtar, 2007) antara lain sebagai berikut:

- a. Konflik yang terjadi di daerah-daerah disebabkan oleh ketidak sesuaian antara kehendak massa partai dengan kepentingan elite, contoh kasus di Manggarai dan Flores Timur.
- b. Konflik yang terjadi antar-elite partai dengan KPUD, karena persoalan administratif, contoh pilkada Medan (2005).
- c. Konflik yang terjadi antara massa pendukung calon yang tidak lolos verifikasi KPUD, sehingga timbul tindak anarkis dari massa pendukung.
- d. Konflik yang terjadi antara *incumbent* dengan *non incumbent* yang disebabkan oleh persoalan *resources* yang tidak seimbang.
- e. Konflik antara massa dengan massa, disebabkan antara lain massa tidak terima calonnya tidak lolos verifikasi, tidak puas hasil dengan pilkada, tidak terima kekalahan dan massa tak mau dipimpin oleh *incumbent*.

Sebelum peraturan perundangan tentang perubahan pilkada berlaku, maka ketentuan pelaksanaan pilkada masih dilaksanakan sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 6 tahun 2005. Oleh sebab itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pilkada langsung adalah sebagai berikut:

1. KPUD perlu mempersiapkan pelaksanaan pilkada yang jujur dan fair.
2. Kandidat kepala daerah serta tim suksesnya diharapkan mau memberikan teladan yang baik kepada pendukungnya sebagai kandidat yang siap menang dan siap kalah dengan cara yang baik-baik.

3. Mempersiapkan instrumen *monitoring* yang ketat terhadap seluruh proses penyelenggaraan pilkada.
4. Mendidik masyarakat agar secara rasional memilih kandidat yang berkualitas.
5. Menutup ruang terjadinya politik uang dan *black campaign*.
6. Membuka ruang partisipasi masyarakat sipil secara luas dalam mengontrol, mengawasi dan mengakses segala proses yang berkaitan dengan Pilkada.
7. Meminimalkan terjadinya konflik dan mempertegas aturan main pilkada.

Rekrutmen Calon Kepala Daerah

Proses rekrutmen calon kepala daerah menjadi paling penting dalam menentukan apakah suatu daerah akan mendapatkan kepala daerah yang handal, kompeten dan mempunyai integritas tinggi membangun daerah. Saat ini, proses rekrutmen kepala daerah mempunyai dua pintu, yaitu melalui partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan (*independen*).

Rekrutmen melalui partai politik menurut UU No. 32 tahun 2004 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- 2) Proses pencalonan harus melalui mekanisme yang demokratis dan transparan dan dalam penetapan calon memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Rekrutmen calon perseorangan (*independent*) merupakan fenomena politik baru di Indonesia. Realitas ini merupakan respons dari perlu diakuinya hak politik warga negara yang ingin turut serta dalam ajang pemilihan kepala daerah tanpa harus melalui kendaraan partai politik. Kenyataan ini juga tidak terlepas dari fakta hukum dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 5/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa proses pencalonan kepala daerah lewat jalur perseorangan dinyatakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara lebih terperinci, calon perseorangan lahir setelah disahkannya

perubahan kedua atas Undang-undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan tersebut merupakan revisi pasal 56 Ayat (2) dan Pasal 59 Ayat (1), (2), dan (3) UU No 32/2004 tentang pemerintah daerah yang sebelumnya hanya memberikan kewenangan kepada partai politik (*partol*) dan gabungan partai politik untuk dapat mencalonkan Kepala Daerah

Kemunculan calon perseorangan membawa lanskap politik baru di daerah seluruh Indonesia, di mana rakyat memiliki banyak alternatif calon pemimpin di daerahnya, tanpa dibatasi hanya kepada calon yang berasal dari partai politik. Hal ini sangat menguntungkan di tengah situasi di mana partai politik di Indonesia saat ini mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat, akibat dari banyaknya kepala daerah yang berasal dari partai politik tersangkut kasus pidana terutama korupsi.

Rekrutmen calon perseorangan (*independen*) harus berhadapan langsung dengan pemilihan bukan dengan partai politik, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan KPU No. 15 tahun 2008, calon gubernur dan wakil gubernur memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5%.
- b) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih 2 juta s.d. 6 juta harus didukung sekurang-kurangnya 5%.
- c) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih 6 juta s.d. 12 juta jiwa harus sekurang-kurangnya 4%.
- d) Provinsi dengan jumlah penduduk 12 juta lebih jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3%.

Besarnya biaya, efisiensi, rekrutmen dan kesadaran berdemokrasi bagi warga negara dalam penyelenggaraan pilkada, maka berbagai analis menyatakan bahwa pilkada serentak memiliki manfaat, diantaranya:

1. Efisiensi anggaran
2. Efektivitas lembaga pemilihan umum
3. Sarana menggerakkan kader partai politik secara luas dan gencar.
4. Mencegah *kutu loncat* (gagal disatu wilayah, menyeberang ke wilayah lain)
5. Perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pemerintah DATI II, DATI I, dan pemerintah pusat.

Kesimpulan

Pemerintah demokrasi ialah pengakuan hakikat manusia, pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara yang satu dan yang lain. Sistem politik demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang konstitusional, karena segala kegiatan politik baik komponen suprastruktur politik maupun infrastruktur politik yang ada semuanya berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawahnya.

Persoalan yang kita hadapi dalam pilkada tersebut adalah bagaimana kita dapat melahirkan kepemimpinan yang lebih dicintai rakyatnya karena kemampuan, tanggung jawab, kecerdasan dalam membawa Jakarta menjadi ibu kota yang stabilitas yang tinggi, kecerdasan dan kemakmuran warganya meningkat.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pilkada langsung (DKI Jakarta) adalah KPUD perlu mempersiapkan pelaksanaan pilkada yang jujur dan *fair*. Kandidat kepala daerah serta tim suksesnya diharapkan mau memberikan teladan yang baik, instrumen *monitoring* yang ketat terhadap seluruh proses penyelenggaraan pilkada, mendidik masyarakat agar secara rasional memilih kandidat yang berkualitas, menutup ruang terjadinya politik uang dan *black campaign*, membuka ruang partisipasi masyarakat sipil secara luas dalam mengontrol, mengawasi dan mengakses segala proses yang berkaitan dengan pilkada, meminimalkan terjadinya konflik dan mempertegas aturan main pilkada.

Daftar Pustaka

- Ambonekspres.com. Kontroversi pilkada serentak. *Ambonekspres.com*, edisi 11 Februari 2015. Diakses dari: <http://ambonekspres.com/2015/02/11/kontroversi-pilkada-serentak/>
- Azra, A. (2003). *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Budiardjo, M. (1986). *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta.

- Dahl, R. A. (1992). *Demokrasi dan para pengeritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Liputan6. Ini 101 daerah yang gelar pilkada serentak 2017. *Liputan6.com*, edisi 15 Februari 2016. Diakses dari: <http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017>
- Syahrial S., & Dkk. (2003). *Sosiologi dan politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahrial, S. (1996). Peranan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia 1977-1993. (*thesis*). Universiti Malaya. Kuala Lumpur, Malaysia.
- Syahrial, S. (2013). *Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahrial, S. (2014). *Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.